

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGGUNA JASA ATAS
TERJADINYA WANPRESTASI YANG TIMBUL DARI KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI
(Studi Tunda Bayar Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tanjungpinang)**

**Oleh
Bambang Irawan
NIM. 2105040137**

ABSTRAK

Fenomena tunda bayar atau keterlambatan pembayaran pada sejumlah proyek konstruksi di Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menimbulkan dampak negatif bagi penyedia jasa. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran terhadap hasil penyerahan pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Ketika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka terjadi wanprestasi, yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sebagai pengguna jasa jika terjadi tunda bayar. Dengan menggunakan pendekatan Normatif empiris, penelitian ini mengacu pada data lapangan serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, dan KUHPerdata. Teori perjanjian dan teori pertanggungjawaban digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pengguna jasa atas terjadinya tunda bayar pada kontrak kerja konstruksi mencerminkan bentuk pertanggungjawaban hukum yang belum sepenuhnya terpenuhi. Tidak dimuatnya materi atau klausul tunda bayar dalam kontrak kerja konstruksi menyebabkan minimnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa, dan membatasi ruang mereka untuk menuntut pemenuhan hak secara legal. Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah sebagai pengguna jasa harus meningkatkan transparansi anggaran, melakukan perencanaan keuangan yang lebih matang, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip *pacta sunt servanda*.

Kata kunci : Tanggungjawab, Wanprestasi, Tunda bayar, Kontrak Kerja Konstruksi

***ANALYSIS OF SERVICE USER RESPONSIBILITY FOR BREACH OF
CONTRACT ARISING FROM CONSTRUCTION WORK CONTRACTS
(CASE STUDY OF CONSTRUCTION WORK CONTRACTS AT THE
PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING OFFICE OF
TANJUNGPINANG CITY)***

**By
Bambang Irawan
NIM. 2105040137**

ABSTRACT

The phenomenon of delayed payments or late payments on a number of construction projects in the Tanjungpinang City Government, especially at the Public Works and Spatial Planning Agency, has had a negative impact on service providers. The provisions of Article 56 paragraph (1) of Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services, service users are required to make payments for the results of the service provider's work delivery in the correct amount and on time. When this obligation is not fulfilled, a default occurs, which results in losses for one of the parties. This study aims to analyze the form of responsibility of the Tanjungpinang City Public Works and Spatial Planning Agency as a service user if there is a delay in payment. Using an empirical normative approach, this study draws on field data and relevant laws and regulations, such as Law No. 2 of 2017, Presidential Regulation No. 12 of 2021, and the Civil Code. Contract theory and liability theory are used as analytical tools in this study. The results show that the form of service user responsibility for delayed payments in construction work contracts reflects a form of legal liability that has not been fully fulfilled. The absence of material or clauses regarding delayed payments in construction work contracts results in minimal legal protection for service providers and limits their scope to demand the fulfillment of their legal rights. Recommendations that can be given are that the Government, as the service user, must increase budget transparency, conduct more thorough financial planning, and ensure compliance with the principle of pacta sunt servanda.

*Keywords : Liability, Breach of contract (wanprestasi), Payment delay,
Construction work contract*